



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 8 Januari 2021/Periodik - 2020)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KOTA MADIUN
UNIT KERJA : BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **AGUS HARIONO**
2. Jabatan : **KEPALA BADAN**
3. NHK : **479230**

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 665.240.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 350 m2/249 m2 di KAB / KOTA KOTA MADIUN , HASIL SENDIRI Rp. 342.827.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 118 m2/48 m2 di KAB / KOTA KOTA MADIUN , HASIL SENDIRI Rp. 70.560.000
3. Tanah Seluas 469 m2 di KAB / KOTA KOTA MADIUN , HASIL SENDIRI Rp. 251.853.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 190.500.000

1. MOBIL, TOYOTA AGYA 10GA/T Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 70.000.000
2. MOTOR, HONDA VARIO Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 8.000.000
3. MOTOR, HONDA BEAT Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 7.500.000
4. MOTOR, HONDA D1B02N26L2A/T Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 10.000.000
5. MOBIL, DAIHATZU AYL A 1.2 R MT Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 95.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 30.000.000**D. SURAT BERHARGA** Rp. ----**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 82.796.533**F. HARTA LAINNYA** Rp. ----

Sub Total Rp. 968.536.533



III. HUTANG

Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 968.536.533

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.